



Identitas Nasional dan Masyarakat Madani: Fondasi Kekuatan Bangsa Indonesia di Era Globalisasi

Audi Rahman¹, Muliana², Kamdani³
UIN Sumatera Utara^{1,2,3}

*Email: audirahman016@gmail.com, mulianamuliana191@gmail.com

Diterima: 25-06-2025 | Disetujui: 30-06-2025 | Diterbitkan: 02-07-2025

ABSTRACT

In maintaining the integrity of a nation, national identity and civil society are two interrelated concepts. This article discusses how national identity functions as the main foundation for building a civil society in Indonesia. Maintaining national identity is important to maintain the character and identity of the nation amidst the challenges of globalization that brings foreign cultural influences. This study examines the elements that form national identity, the function of Pancasila as the foundation of the state, and the characteristics of an ideal civil society. The results show that strengthening national identity and implementing Pancasila values can help build a democratic, tolerant, and civilized civil society. In addition, strengthening the values of friendship through education, culture, and active community participation are important keys in facing the increasingly complex flow of globalization. Thus, national identity is not only a symbol, but also the main foundation in realizing a just, prosperous, and civilized society.

Keywords: national identity, civil society, Pancasila, globalization, democracy.

ABSTRAK

Dalam menjaga integritas suatu bangsa, identitas nasional dan masyarakat madani adalah dua konsep yang saling berhubungan. Artikel ini membahas bagaimana identitas nasional berfungsi sebagai landasan utama untuk membangun masyarakat madani di Indonesia. Menjaga identitas nasional adalah penting untuk mempertahankan karakter dan jati diri bangsa di tengah tantangan globalisasi yang membawa pengaruh budaya asing. Kajian ini meneliti elemen yang membentuk identitas nasional, fungsi Pancasila sebagai dasar negara, dan ciri-ciri masyarakat madani yang ideal. Hasilnya menunjukkan bahwa memperkuat identitas nasional dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat membantu membangun masyarakat madani yang demokratis, toleran, dan berkeadaban. Selain itu, penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan, budaya, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci penting dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin kompleks. Dengan demikian, identitas nasional tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.

Kata kunci: identitas nasional, masyarakat madani, Pancasila, globalisasi, demokrasi.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Audi Rahman, Muliana, & Kamdani. (2025). Identitas Nasional dan Masyarakat Madani: Fondasi Kekuatan Bangsa Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 567-578. <https://doi.org/10.63822/zrvkxj50>

PENDAHULUAN

Identitas nasional merupakan jati diri yang melekat pada suatu bangsa dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Identitas nasional tidak hanya berasal dari simbol-simbol formal seperti bendera, lagu kebangsaan, atau bahasa nasional, tetapi juga berasal dari tradisi, nilai-nilai, budaya, dan pengalaman masa lalu yang membentuk identitas Negara. Keberadaan identitas nasional menjadi pondasi utama dalam menjaga kedaulatan, persatuan, dan keutuhan bangsa, khususnya bagi negara yang memiliki keberagaman seperti Indonesia. Identitas nasional menjadi landasan penting untuk menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar, sehingga bangsa tidak mudah terpecah atau terombang-ambing oleh perubahan zaman.

Sebaliknya, gagasan masyarakat madani, juga dikenal sebagai masyarakat sipil, merujuk pada tatanan sosial yang demokratis yang mempertahankan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan kemandirian masyarakat. Menurut Madjid 1997. sejarah masyarakat Islam Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW adalah dasar dari gagasan masyarakat madani, yang memiliki karakteristik utama seperti keterbukaan, musyawarah, penghormatan pada perbedaan, dan supremasi hukum. Masyarakat madani, menurut Hikam, adalah ruang sosial yang mandiri, tidak dikontrol oleh negara, dan bebas.

Identitas nasional menjadi semakin sulit di era globalisasi. Disebabkan oleh kemajuan dalam bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, globalisasi telah mendorong pertukaran budaya, ideologi, dan nilai-nilai yang sangat cepat antara negara-negara. Pengaruh budaya asing dapat menyebabkan masyarakat kehilangan orientasi terhadap nilai-nilai nasional dan cenderung mengadopsi budaya asing yang tidak selalu sejalan dengan jati diri bangsa. Ini terjadi jika tidak ada ketahanan budaya yang kuat.

Fenomena ini terlihat jelas dalam kehidupan generasi muda, yang mulai mengalami kehilangan identitas, nilai gotong royong, dan rasa nasionalisme yang menurun. Studi yang dilakukan oleh Mifta. menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah diterapkan oleh dunia globalisasi, tetapi hanya secara simbolis dan belum masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, negara Indonesia menghadapi tantangan besar karena munculnya budaya populer yang mendukung gaya hidup konsumtif, hedonistik, dan individualis.

Pancasila berfungsi sebagai benteng sekaligus kompas moral bangsa di tengah arus globalisasi yang cepat. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga merupakan identitas nasional yang menyatukan semua elemen bangsa di tengah perbedaan. Dalam menghadapi tantangan kontemporer, Pancasila mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan sosial, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan.

Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki secara menyeluruh hubungan antara identitas nasional dan masyarakat madani, khususnya dalam konteks menjaga keutuhan bangsa di era globalisasi. Studi ini diharapkan dapat membantu memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan membangun masyarakat madani yang demokratis, inklusif, dan berkeadaban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih

karena masalah yang diangkat bersifat teoretis, yaitu hubungan antara identitas nasional dan masyarakat madani di Indonesia.

Menurut Zed, studi pustaka adalah aktivitas yang mencakup metode pengumpulan data yang berasal dari literatur. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori yang kuat serta data sekunder yang relevan untuk mendukung analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen terkait yang membahas tentang: 1.) Pengertian, unsur, dan fungsi identitas nasional. 2) Konsep dan karakteristik masyarakat madani (civil society). 3) Tantangan globalisasi terhadap identitas nasional. 4) eran Pancasila sebagai dasar negara sekaligus benteng identitas nasional.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yang berarti bahwa deskripsi, analisis, dan interpretasi data dari berbagai sumber dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hubungan antara konsep yang diteliti. Metode ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis; sebaliknya, itu bertujuan untuk memahami fenomena secara menyeluruh dengan melakukan penelitian literatur yang tersedia saat ini.

Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas tentang pentingnya memperkuat identitas nasional untuk membangun masyarakat madani di tengah tantangan globalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Nasional: Pengertian, Unsur, dan Fungsi

Pengertian Identitas Nasional

Identitas nasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan nilai, norma, simbol, budaya, dan karakteristik yang membedakan suatu negara dari negara lain. Identitas ini berasal dari proses sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang berkembang selama sejarah bangsa. Identitas nasional dilihat dalam studi kewarganegaraan sebagai konstruksi sosial yang disepakati oleh warga negara untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Identitas nasional tidak hanya berbicara tentang simbol formal seperti bendera, bahasa nasional, lambang negara, atau lagu kebangsaan, melainkan juga nilai-nilai esensial yang tertanam dalam jiwa masyarakat. Gotong royong, saling menghormati perbedaan, musyawarah untuk mencapai konsensus, dan solidaritas antara warga negara adalah beberapa dari nilai-nilai ini. Modal sosial ini sangat penting untuk membangun negara yang berdaulat, bermartabat, dan berkeadilan sosial.

Identitas bangsa Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang menegaskan bahwa bangsa ini tetap satu dalam ikatan kebangsaan meskipun memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Identitas ini lahir dari proses panjang interaksi antarsuku, antarbudaya, dan antaragama yang kemudian dirumuskan menjadi konsensus nasional pasca kemerdekaan.

Unsur-Unsur Pembentuk Identitas Nasional

Identitas nasional Indonesia tidak terbentuk secara instan, melainkan merupakan hasil akumulasi sejarah panjang, pengalaman kolektif, dan interaksi budaya yang kompleks. Beberapa unsur utama yang membentuk identitas nasional antara lain:

Sejarah Bersama

Identitas nasional, termasuk Indonesia, dibentuk sebagian besar oleh sejarah mereka. Sejarah adalah lebih dari sekedar daftar peristiwa yang terjadi di masa lalu; itu adalah kisah proses pembentukan bangsa. Sejarah Indonesia menyatukan berbagai macam orang dari berbagai suku, agama, budaya, dan lokasi.

Negara Indonesia telah mengalami berbagai jenis penjajahan yang panjang dan membosankan sejak abad ke-16. Pada awalnya, berbagai kerajaan dan komunitas lokal di seluruh nusantara memiliki identitas lokal yang kuat. Menjelang penjajahan Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang, orang-orang di negara-negara ini secara bertahap belajar bahwa mereka adalah bagian dari negara yang lebih besar, Indonesia. Kesadaran nasional muncul sebagai hasil dari perjuangan yang panjang terhadap penjajahan.

Perlawanan tidak hanya dalam bentuk fisik melalui peperangan di berbagai daerah, seperti Perang Diponegoro (1825–1830), Perang Aceh (1873–1904), atau Perang Bali, tetapi juga melalui jalur diplomasi dan pendidikan. Generasi awal kaum terpelajar Indonesia seperti Soetomo, Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, dan Haji Agus Salim, mulai merumuskan gagasan tentang kebangsaan, kedaulatan, dan persatuan sebagai bangsa yang merdeka.

Momentum puncak dari kesadaran sejarah kolektif bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, yang menegaskan tiga komitmen besar: bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menurut Lisdiana, Sudrajat, dan Kirani, Sumpah Pemuda adalah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia karena untuk pertama kalinya berbagai kelompok pemuda dari berbagai daerah dan budaya sepakat untuk melepaskan identitas kedaerahan untuk mendukung satu identitas nasional.

Sumpah Pemuda bukan akhir sejarah. Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945 juga merupakan peristiwa penting di mana Pancasila dirumuskan. Pancasila telah berkembang menjadi konsensus nasional yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan menjadi dasar negara yang disetujui oleh semua bagian masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi puncak dari perjuangan panjang orang Indonesia untuk menjadi negara merdeka dan bebas dari penjajahan.

Perjalanan sejarah Indonesia setelah kemerdekaan penuh dengan perubahan, mulai dari perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan selama Agresi Militer Belanda pertama dan kedua, hingga pergeseran politik dan sosial selama Orde Lama dan Orde Baru, serta Reformasi. Semua peristiwa sejarah ini meninggalkan nilai-nilai yang meningkatkan rasa kebangsaan, rasa persatuan, dan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan negara.

Selain itu, sejarah bersama berfungsi sebagai alat untuk menumbuhkan rasa memiliki, atau perasaan belonging, terhadap negara dan bangsa. Perspektif ini melihat sejarah sebagai "narasi kebangsaan" yang bertahan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Identitas nasional Indonesia terus diperkuat melalui pendidikan sejarah, upacara bendera, peringatan hari-hari besar nasional, dan pelestarian monumen dan situs sejarah.

Lebih jauh, narasi sejarah juga berfungsi sebagai instrumen pemersatu di tengah keberagaman yang ada. Indonesia, yang memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah, sangat rentan untuk runtuh jika tidak ada narasi sejarah yang disepakati. Meskipun ada perbedaan dalam budaya dan identitas lokal, semua orang Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang sama dalam menentang penjajahan dan membangun negara mereka sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh catatan sejarah.

Oleh karena itu, sejarah kolektif merupakan bagian penting dari pembentukan identitas nasional. Ia adalah pondasi yang menopang rasa persatuan dan kebangsaan, dan ia menjadi pengingat abadi bahwa perjuangan yang panjang dan penuh darah telah menghasilkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa ini. Oleh karena itu, menjaga, memahami, dan menghargai sejarah adalah bagian penting dari mempertahankan identitas nasional Indonesia di tengah tantangan modern, seperti modernisasi dan globalisasi.

Kebudayaan dan Nilai Sosial

Kebudayaan adalah salah satu komponen paling penting yang membentuk dan mempertahankan identitas nasional. Seni, adat istiadat, dan tradisi bukanlah satu-satunya aspek dari kebudayaan; itu juga mencakup norma, nilai, cara berpikir, sistem sosial, dan cara hidup yang dipegang dan dijalankan oleh suatu bangsa. Dalam kasus Indonesia, kebudayaan berfungsi sebagai pilar utama yang menyatukan keberagaman menjadi identitas nasional yang kokoh.

Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 1.300 kelompok etnik, memiliki budaya yang sangat kaya. Adat istiadat, bahasa, seni, pakaian tradisional, arsitektur, dan makanan khas masing-masing daerah. Namun, konsep budaya nasional merupakan bagian penting dari identitas bangsa dan menyatukan semua kekayaan budaya lokal.

Nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, toleransi, rasa hormat terhadap sesama, dan kepedulian sosial, menjadi ciri khas budaya yang sangat kuat. Nilai-nilai ini diwariskan dari nenek moyang ke generasi berikutnya, baik secara formal melalui pendidikan maupun secara informal melalui praktik sehari-hari. Misalnya, nilai sosial yang berakar pada budaya Indonesia dapat diterapkan melalui praktik gotong royong, yang termasuk membangun rumah, membersihkan lingkungan, atau membantu tetangga yang mengalami kesulitan.

Namun demikian, penting untuk memahami bahwa budaya bukanlah sesuatu yang tetap atau statis. Sebaliknya, budaya selalu berubah dan berubah seiring berjalannya waktu. Karena globalisasi, kemajuan teknologi, dan arus informasi yang cepat, budaya Indonesia menghadapi tantangan dan peluang. Globalisasi dapat memperkaya budaya lokal dengan inovasi dan pengetahuan baru, tetapi juga dapat menghancurkan nilai-nilai budaya lokal jika masyarakat tidak memiliki ketahanan budaya yang kuat.

Sebagai contoh, budaya gotong royong di sebagian komunitas mulai tergeser oleh gaya hidup individualistik yang lebih menekankan pada kepentingan pribadi. Begitu juga dengan budaya konsumtif yang mulai menggeser nilai-nilai kesederhanaan yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ketahanan budaya menjadi sangat penting dalam menjaga identitas nasional.

Ketahanan budaya dapat dibangun melalui beberapa cara, antara lain:

- Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan formal dan informal.
- Memperkuat peran keluarga dan komunitas dalam mentransfer nilai budaya kepada generasi muda.
- Mengembangkan media dan teknologi informasi yang mendukung pelestarian budaya lokal.
- Mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung pelestarian budaya, seperti pelestarian bahasa daerah, kesenian tradisional, dan kearifan lokal.

Lebih jauh, budaya juga berfungsi sebagai media diplomasi bangsa. Budaya Indonesia yang kaya menjadi daya tarik di kancah internasional dan menjadi identitas yang membanggakan. Festival budaya, pertunjukan seni, kuliner, hingga diplomasi batik dan kain tradisional adalah bagian dari cara Indonesia memperkenalkan jati dirinya kepada dunia.

Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga menjadi alat yang sangat penting untuk menjaga eksistensi Indonesia baik di masa kini maupun di masa depan. Nilai-nilai sosial dan kebudayaan ini berfungsi sebagai pondasi bagi penguatan identitas nasional yang berkelanjutan, dan juga menjadi benteng yang menjaga Indonesia kokoh di tengah arus perubahan global.

Bahasa Nasional Sebagai Alat Pemersatu

Bahasa memegang peran yang sangat fundamental dalam membangun identitas nasional suatu bangsa. Bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga menjadi alat ekspresi budaya, simbol persatuan, serta sarana pewarisan nilai-nilai dan pengetahuan antar generasi. Dalam konteks Indonesia, bahasa nasional yakni **bahasa Indonesia** menjadi salah satu unsur terpenting dalam menyatukan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, agama, budaya, dan bahasa daerah.

Secara historis, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang sejak abad ke-7 sudah berfungsi sebagai bahasa perdagangan, bahasa antar suku, dan bahasa pengantar di berbagai kerajaan maritim di Nusantara. Bahasa Melayu dikenal sebagai bahasa yang fleksibel, mudah dipelajari, dan bersifat inklusif, sehingga dengan cepat diterima dan digunakan oleh berbagai komunitas di wilayah Nusantara.

Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah menyatakan komitmen mereka terhadap satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air, yaitu bahasa Indonesia. Ini adalah momen yang paling signifikan dalam penegasan bahasa Indonesia sebagai alat untuk menyatukan orang. Ikrar ini menjadi momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menunjukkan kesadaran bangsa bahwa untuk membangun kesatuan nasional diperlukan alat komunikasi yang mampu menembus batas geografis, etnik, dan budaya.

Bahasa Indonesia tidak hanya memiliki makna simbolis yang signifikan, tetapi juga digunakan sebagai media komunikasi formal dalam pemerintahan, institusi pendidikan, dan media massa. Lebih dari 1.300 kelompok etnis dengan 718 bahasa daerah yang berbeda menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat untuk menciptakan identitas nasional. Dalam kondisi seperti ini, tanpa adanya bahasa yang dapat mempersatukan bangsa, negara Indonesia akan sangat rentan terfragmentasi dan mengalami disintegrasi sosial dan politik. Bahasa juga penting untuk komunikasi dan pelestarian budaya bangsa karena berfungsi sebagai alat transmisi budaya di mana norma, adat istiadat, nilai-nilai lokal, dan pengetahuan tradisional diwariskan dari generasi ke generasi.

Namun, bahasa Indonesia menghadapi banyak masalah di era globalisasi saat ini. Berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia mulai terpengaruh oleh dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, terutama di bidang pendidikan, teknologi, dan bisnis. Fenomena ini menyebabkan rasa rendah hati terhadap bahasa nasional, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbiasa menggunakan istilah asing daripada kosakata bahasa Indonesia. Kecenderungan untuk menggunakan bahasa lokal secara berlebihan merupakan tantangan lain yang tidak kalah penting. Karena tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari, banyak bahasa lokal berada di ambang kepunahan. Indonesia akan kehilangan warisan budaya dan identitas nasionalnya jika tidak ada kebijakan yang serius untuk melestarikan bahasa daerah.

Dengan demikian, peran negara dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia sangat penting. Pemerintah menetapkan bahwa bahasa Indonesia harus digunakan sebagai bahasa resmi negara dalam semua aspek kehidupan nasional, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Selain itu, kurikulum dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi harus terus menempatkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran utama yang tidak hanya diajarkan

secara teknis, tetapi juga ditanamkan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat identitas nasional. Pendidikan harus memainkan peran penting dalam meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu.

Selain itu, beberapa universitas di luar negeri mulai menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing dalam bidang diplomasi internasional. Ini adalah langkah strategis untuk memperkenalkan budaya dan identitas Indonesia ke dunia internasional, memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global. Bahasa Indonesia lebih dari sekadar alat komunikasi; itu adalah perekat bangsa, simbol identitas, dan benteng budaya yang perlu dijaga, dikembangkan, dan dilestarikan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Bahasa mencerminkan jiwa bangsa, dan tanpa bahasa yang kokoh, identitas nasional Indonesia akan kehilangan pijakan pentingnya.

Sistem Politik dan Hukum: Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah sistem politik Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai utama Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa. Demokrasi ini merupakan kombinasi dari budaya lokal, kebiasaan agama, dan kearifan nasional yang berkembang sebelum dan sesudah kemerdekaan.

Tidak seperti demokrasi liberal yang berkembang di Barat, yang lebih menonjolkan pada kebebasan individu secara absolut, kompetisi politik tanpa batas, dan dominasi mayoritas, demokrasi Pancasila menempatkan prinsip musyawarah untuk mufakat sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan. Demokrasi Pancasila juga menekankan prinsip gotong royong, keseimbangan hak dan kewajiban, dan keadilan sosial untuk setiap warga negara Indonesia.

Menurut Ubaedillah dan Rozak, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memperhatikan kepentingan rakyat secara keseluruhan, tidak memaksakan keinginan individu atau kelompok tertentu, dan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan, harmoni, dan persatuan. Kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan ketertiban hukum adalah prioritas utama demokrasi ini, yang mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.

Prakteknya, sistem politik Indonesia memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik melalui berbagai institusi seperti partai politik, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, ini tetap sesuai dengan Pancasila. Mekanisme pemilu yang adil, jujur, dan berpusat pada musyawarah menjalankan prinsip kedaulatan rakyat. Namun, proses ini disesuaikan dengan sistem perwakilan kontemporer.

Selain dalam sistem politik, sistem hukum Indonesia juga merupakan cerminan dari identitas nasional yang khas. Sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, yaitu perpaduan dari tiga sumber utama:

- 1) Hukum Adat, yang bersumber dari nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masing-masing daerah di Indonesia.
- 2) Hukum Agama, terutama hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di bidang-bidang tertentu seperti pernikahan, waris, dan wakaf.
- 3) Hukum Nasional, yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan modern, termasuk dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Dalam konteks negara hukum Indonesia, ketiga sumber hukum tersebut bekerja sama dan bekerja sama satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap berpegang pada budaya dan agamanya, tetap berpegang pada hukum modern, dan tidak meninggalkannya.

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Artinya, segala bentuk kekuasaan harus tunduk pada hukum, dan hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini tampak jelas dalam pembukaan UUD 1945 yang mengandung empat pokok pikiran, yaitu:

- 1) Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 2) Negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Negara menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 4) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia tidak hanya mengatur hubungan antara warga negara, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai nasional. Misalnya, prinsip-prinsip hukum lingkungan yang berkaitan dengan pelestarian alam sesuai dengan budaya lokal di berbagai wilayah. Hukum Islam dan hukum adat tetap dihormati sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam hukum keluarga.

Selain itu, identitas nasional Indonesia dibentuk oleh karakteristik unik dari sistem politik dan hukum negara ini. Indonesia tetap menjadi negara yang menjunjung tinggi spiritualitas, budaya lokal, dan kearifan nasional dalam konteks negara hukum demokratis dan berkeadilan sosial. Ini berbeda dengan banyak negara lain yang cenderung mengadopsi sistem hukum yang sepenuhnya sekuler atau liberal.

Dengan kata lain, sistem hukum Indonesia dan demokrasi Pancasila berfungsi sebagai alat negara serta sebagai manifestasi dari identitas nasional yang tumbuh dan berkembang di seluruh masyarakat. Menurut model ini, Indonesia mampu mengelola keberagaman secara bersamaan tanpa kehilangan nilai-nilai budaya, agama, dan tradisi bangsa.

Simbol Nasional

Simbol-simbol negara adalah manifestasi konkret dari identitas nasional. Simbol tersebut tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga memiliki makna filosofis yang dalam:

- **Bendera Merah Putih**, melambangkan keberanian (merah) dan kesucian (putih).
- **Lambang Garuda Pancasila**, dengan perisai berlambang lima sila, mencerminkan falsafah hidup bangsa Indonesia.
- **Lagu Kebangsaan Indonesia Raya**, yang membangkitkan semangat nasionalisme.
- **Semboyan Bhinneka Tunggal Ika**, yang menegaskan bahwa meskipun berbeda-beda tetap satu jua (Hikam, 1999, hlm. 30).

Simbol-simbol ini menjadi pengingat bagi seluruh warga negara akan tanggung jawab mereka terhadap bangsa dan negara.

Geografi dan Lingkungan Alam

Letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik) turut membentuk karakter bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki keragaman budaya, adat istiadat, dan bahasa yang luar biasa. Lingkungan alam yang kaya, mulai dari pegunungan, hutan hujan tropis, hingga lautan luas, tidak hanya mempengaruhi ekonomi dan mata pencaharian masyarakat, tetapi juga membentuk mentalitas bangsa yang ulet, tangguh, dan adaptif.

Fungsi Identitas Nasional

Identitas nasional memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain:

- **Sebagai Penanda Eksistensi Bangsa**

Identitas nasional menjadi bukti eksistensi sebuah bangsa di tengah komunitas global. Tanpa identitas yang jelas, sebuah bangsa akan kehilangan arah, mudah terombang-ambing oleh pengaruh luar, dan akhirnya mengalami krisis jati diri.

- **Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa**

Di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan suku, agama, dan bahasa, identitas nasional berfungsi sebagai perekat yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Tanpa identitas nasional yang kuat, potensi disintegrasi bangsa akan semakin besar.

- **Sebagai Cerminan Jati Diri dan Karakter Bangsa**

Identitas nasional mencerminkan karakter dan jati diri bangsa. Melalui nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, persatuan, dan toleransi, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, terbuka, namun tetap tegas dalam mempertahankan kedaulatan dan budayanya.

- **Sebagai Benteng Pertahanan Budaya**

Di tengah arus globalisasi yang membawa budaya asing, identitas nasional berfungsi sebagai benteng pertahanan yang melindungi bangsa dari lunturnya nilai-nilai budaya lokal. Identitas ini menjadi filter bagi masuknya budaya asing agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai nasional.

- **Sebagai Pembeda dengan Bangsa Lain**

Setiap bangsa memiliki karakteristiknya sendiri. Identitas nasional menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia dari bangsa lain, baik dalam aspek budaya, politik, maupun sosial.

- **Sebagai Pedoman dan Arah dalam Berbangsa dan Bernegara**

Identitas nasional menjadi rujukan bagi seluruh kebijakan negara dan perilaku warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam identitas nasional menjadi panduan dalam membangun bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pancasila Sebagai Hakikat Identitas Nasional

Pancasila bukan hanya dasar negara Indonesia tetapi juga simbol identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan semangat persatuan adalah dasar Pancasila. Selanjutnya, prinsip-prinsip ini disusun menjadi lima prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan nasional dan internasional.

Pancasila menunjukkan identitas bangsa yang unik. Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu identitas, yaitu bangsa Indonesia, di tengah keragaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Pancasila juga membantu menjaga nilai-nilai budaya bangsa agar tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan sifat bangsa itu sendiri.

Kelima sila dalam Pancasila memiliki makna yang sangat dalam dan saling berkaitan:

- Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, menghormati semua agama, dan menjunjung tinggi nilai spiritual dan toleransi antar umat beragama.

- Kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai martabat setiap individu, dan menolak segala bentuk penindasan dan ketidakadilan.
- Persatuan Indonesia, menegaskan pentingnya menjaga keutuhan bangsa, tanpa memandang perbedaan suku, agama, budaya, dan ras. Sila ini menjadi perekat utama dalam kehidupan berbangsa.
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia bersifat demokratis, tetapi dengan cara yang khas, yaitu musyawarah dan mufakat, bukan semata-mata suara terbanyak.
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan komitmen bangsa untuk mewujudkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun politik, demi terciptanya kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi aturan dasar negara, tetapi juga merupakan identitas nasional yang melekat pada bangsa Indonesia. Pancasila adalah pedoman moral, landasan etika, sekaligus benteng yang menjaga bangsa ini tetap kokoh di tengah berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar.

Masyarakat Madani: Konsep dan Ciri-Ciri

Masyarakat madani, juga dikenal sebagai masyarakat sipil, adalah masyarakat yang mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, keadaban, demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Memiliki akar sejarah yang kuat, istilah "masyarakat madani" di Indonesia mengacu pada masyarakat ideal Nabi Muhammad SAW di Madinah, yang terdiri dari masyarakat yang damai, adil, dan menghargai perbedaan. Secara sederhana, masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab di mana warganya aktif berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, bebas berpendapat, menjunjung tinggi hukum, menghormati hak-hak sesama, dan tidak bergantung pada negara. Masyarakat madani sangat penting untuk membangun negara yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Ciri-ciri Masyarakat Madani:

- **Menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum.**
Setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat madani sadar dan patuh pada hukum yang berlaku. Hukum menjadi acuan utama dalam menyelesaikan setiap persoalan, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
- **Memiliki peradaban yang tinggi.**
Peradaban tidak hanya dilihat dari kemajuan teknologi atau ekonomi, tetapi juga dari cara masyarakat memperlakukan sesama dengan adil, beretika, dan penuh rasa hormat.
- **Mengedepankan kesederajatan (egalitarian) dan keterbukaan.**
Dalam masyarakat madani, tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, ataupun status sosial. Semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dan dalam kehidupan bermasyarakat.
- **Memiliki ruang publik yang bebas.**

Masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut. Ruang publik yang bebas ini menjadi tempat bertemunya berbagai pemikiran dan gagasan demi kemajuan bersama.

- **Menjunjung tinggi demokrasi, toleransi, dan pluralisme.**

Masyarakat madani selalu menghargai perbedaan dan mengedepankan dialog, musyawarah, serta toleransi. Sistem demokrasi dijalankan dengan sehat, tanpa paksaan atau dominasi kelompok tertentu.

Peran Masyarakat Madani:

Masyarakat madani menjadi pondasi utama bagi terwujudnya negara yang adil, makmur, dan demokratis. Tanpa kehadiran masyarakat madani, demokrasi bisa berjalan tidak sehat, hukum menjadi tidak efektif, dan hak-hak warga negara bisa terabaikan. Oleh karena itu, membangun masyarakat madani adalah tugas bersama antara warga negara, lembaga sosial, dan pemerintah.

Tantangan Globalisasi terhadap Identitas Nasional

Era globalisasi membawa banyak perubahan besar bagi kehidupan bangsa-bangsa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Teknologi, budaya, dan ekonomi globalisasi dapat diakses tanpa batas. Di sisi lain, globalisasi memiliki banyak keuntungan, seperti kemudahan komunikasi, kemajuan teknologi, pertukaran pengetahuan, dan terbukanya pasar internasional. Sebaliknya, identitas nasional juga dirusak oleh globalisasi, terutama bagi negara dengan banyak budaya seperti Indonesia.

Tergerusnya nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, musyawarah, saling menghormati, dan persatuan adalah salah satu tantangan besar dari globalisasi. Pola pikir, gaya hidup, dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda, mulai dipengaruhi oleh budaya asing yang cenderung individualistis, materialistis, dan konsumtif. Karena fenomena ini, rasa nasionalisme dan cinta tanah air mulai menurun, dan mereka digantikan oleh gaya hidup yang lebih egois dan budaya asing.

Selain itu, globalisasi menyebabkan krisis identitas, yaitu ketika seseorang atau kelompok masyarakat mulai kehilangan jati diri budaya dan nilai-nilai bangsa mereka sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya penggunaan bahasa lokal, hilangnya tradisi lokal, dan semakin jauhnya generasi muda dari sejarah dan budaya bangsa mereka sendiri. Tidak hanya itu, kemajuan teknologi digital dan media sosial telah menimbulkan konsekuensi negatif. Media sosial memiliki potensi untuk menyebarkan budaya dan mempromosikan identitas bangsa, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk ke budaya lain yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip budaya Indonesia dan Pancasila.

Solusi Menghadapi Tantangan Globalisasi:

Untuk menghadapi tantangan ini, perlu ada langkah konkret, seperti:

- Memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila di sekolah, keluarga, dan masyarakat.
- Melestarikan budaya lokal, termasuk bahasa daerah, adat istiadat, kesenian, dan tradisi sebagai warisan bangsa.
- Mengoptimalkan peran media dan teknologi untuk memperkenalkan budaya dan nilai-nilai Indonesia, baik di dalam negeri maupun ke dunia internasional.
- Menumbuhkan kembali semangat nasionalisme melalui kegiatan yang membangkitkan rasa cinta tanah air, seperti peringatan hari-hari nasional, festival budaya, dan pendidikan sejarah.

Dengan demikian, meskipun globalisasi membawa banyak tantangan, bangsa Indonesia tetap bisa mempertahankan identitas nasionalnya jika terus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, budaya lokal, dan semangat persatuan.

KESIMPULAN

Identitas nasional dan masyarakat madani saling terkait dan saling terkait, seperti yang ditunjukkan oleh diskusi sebelumnya. Identitas nasional adalah dasar utama bagi masyarakat madani, yang mencakup masyarakat yang demokratis, berkeadaban, mempertahankan hukum, hak asasi manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi.

Identitas nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh Pancasila, yang merupakan dasar negara dan pedoman hidup rakyat Indonesia. Pancasila berisi nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini dapat memberikan landasan moral, hukum, dan budaya yang kuat bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan zaman, terutama di era globalisasi saat ini.

Globalisasi, di sisi lain, memiliki dampak yang sangat besar, dengan dampak yang baik dan dampak buruk. Tantangan utamanya adalah kehilangan prinsip gotong royong, rasa nasionalisme yang menurun, dan kurangnya kesadaran akan budaya lokal, khususnya di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk memperkuat identitas nasional, seperti menanamkan nilai-nilai Pancasila di sekolah, menjaga budaya lokal, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan meningkatkan peran komunitas dalam membangun masyarakat madani yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial.

Identitas nasional yang kokoh dan penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten akan memungkinkan Indonesia untuk mengatasi tantangan globalisasi tanpa kehilangan jati dirinya. Hal ini sangat penting untuk membangun masyarakat madani yang demokratis, toleran, berkeadilan, dan berkeadaban. Tujuannya adalah untuk membuat Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Hikam, M. A. S. (1999). *Demokrasi dan civil society*. Jakarta: LP3ES.
- Lisdiana, F. M., Sudrajat, I., & Kirani, M. Z. (2023). Identitas nasional dalam bingkai Negara Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 47–51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7982979>
- Madjid, N. (1997). *Masyarakat madani: Agama, demokrasi, dan pluralisme*. Jakarta: Paramadina.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Setialaksana, N., & Gustaman, R. F. (2018). *Teori-teori dasar pendidikan kewarganegaraan*. Ciamis: Galuh Nurani Publishing House.
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. (2011). *Pendidikan kewarganegaraan: Paradigma terbaru untuk mahasiswa*. Jakarta: Alfabeta.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2003). *Pendidikan kewarganegaraan: Pancasila, demokrasi, HAM dan masyarakat madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.